

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari tujuh kecamatan dan memiliki ragam budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, kabupaten ini mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat walaupun tidak semaju pulau Jawa. Kemajuan yang terjadi berupa kemajuan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata . Kabupaten Nagekeo tergolong daerah yang beriklim tropis dan terbentang hampir sebagian besar padang rumput, juga ditumbuhi pepohonan seperti kemiri, asam, kayu manis, lontar dan sebagainya serta kaya dengan fauna, antara lain hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil, unggas, binatang menjalar, dan binatang liar. Disamping itu daerah ini kaya dengan obyek wisata seperti Pantai Ena Gera. Panorama alam seperti air panas (Putu) dan wisata budaya seperti peninggalan batu rumah adat tradisional, kesenian dan kerajinan

Kemajuan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo tidak luput dari kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah daerah yang dalam undang – undang no 22 tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah (eksekutif) bersama DPRD (legislatif), oleh karena itu salah satu lembaga pemerintah daerah yang berperan penting dalam kemajuan Kabupaten Negekeo adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Kabupaten Nagekeo sendiri DPRD mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan DPRD di daerah lain yang ada di Indonesia yaitu menjalankan tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif dan beranggotakan wakil-wakil dari organisasi peserta pemilu. Namun sejalan dengan perkembangan situasi dan politik nasional yang berubah secara drastis yaitu berkembangnya demokrasi diiringi munculnya partai politik yang baru, maka penataan perwakilan suara rakyat berupa kelembagaan. DPRD juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kwantitas, hal ini

tercermin melalui tampilan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi meningkatkan kinerja dan kelancaran secara berdaya dan berhasil guna, diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kantor DPRD sebagai bangunan Negara mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan tugas pemerintahan yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib.

Kantor DPRD merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintah dari anggota dewan legislatif dalam bentuk bangunan. Aktifitas kegiatan tersebut berhubungan dengan dua unsur yaitu kelembagaan eksekutif dengan masyarakat dimana keduanya mempengaruhi tugas dan wewenang dari anggota dewan legislatif. Hubungan DPRD dengan lembaga pemerintahan merupakan hubungan kerja yang berkaitan dengan wewenang DPRD sebagai pengontrol pemerintah, sedangkan hubungan dengan masyarakat merupakan hubungan tugas dari DPRD sebagai penampung aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada pemerintah, sehingga tugas dan wewenang itulah yang merupakan pembentuk dan fungsi dari bangunan itu sendiri. Namun untuk pembangunan kantor DPRD di Kabupaten Nagekeo sendiri masih memiliki beberapa kendala sehingga pembangunannya tidak selesai sesuai dengan perencanaan yang ada. Peran pemerintah Kabupaten Negekeo dalam pembangunan kantor DPRD Kabupaten Negekeo sendiri kurang baik sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam pembangunan. Kendala yang dialami dalam pembangunan ini berupa lahan yang digunakan dalam pembangunan kantor DPRD Kabupaten Nagekeo masih merupakan tanah sengketa dari suku Lape, sehingga untuk sementara kantor DPRD kabupaten Nagekeo belum dapat difungsikan sehingga aktifitas ataupun kegiatan para anggota DPRD dilaksanakan di gedung lain.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan peraturan terkait yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya, maka pembangunan kantor DPRD Kabupaten Nagekeo menjadi pilihan yang perlu dilakukan untuk membangun kembali aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan merepresentasikan bangunan gedung kantor pemerintah yang inovatif dan progresif yang bercirikan arsitektur lokal dengan sekaligus adaptatif terhadap perkembangan arsitektur modern kedepan. Penggunaan tema **“Transformasi Arsitektur”** diharapkan bisa mengaplikasikan metode dan teknik transformasi arsitektur khususnya arsitektur lokal kabupaten Nagekeo ke dalam desain gedung DPRD dengan memperhatikan keadaan topografi serta iklim yang ada.

Perencanaan kantor atau gedung DPRD Kabupaten Nagekeo bertujuan sebagai tempat atau wadah bagi wakil-wakil rakyat untuk bekerja dan menyalurkan aspirasi sehingga diharapkan bangunan DPRD yang direncanakan ini mencerminkan bangunan yang merakyat. Rakyat dalam artian bahwa bangunan tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara rakyat dan para wakilnya yang duduk di lembaga DPRD. Perencanaan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo memberikan kesan berwibawa dan terbuka sehingga secara visual seolah-olah rakyat merasa terlindungi, terwakili dan tersalurkan aspirasinya serta tetap menghormati kedudukan dan keberadaan para wakil rakyat. Selain itu perencanaan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo ini harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo dan penggunaan sistem struktur dengan melihat keadaan topografi yang ada pada lokasi. Perencanaan gedung atau kantor DPRD ini juga harus mempertimbangkan aspek iklim tropis yang

khas di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Nagekeo serta mendukung upaya penggunaan energi yang efisien dan pemanfaatan maksimal potensi tata cahaya dan udara secara cerdas dengan mengadopsi prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan (*sustainable architecture*) antara lain : (1) Konsumsi sumber daya alam, termasuk konsumsi air dan energi secara minimal dan mempertimbangkan penggunaan sumber energi terbarukan, (2) Memberikan dampak negatif yang minimal terhadap alam, lingkungan dan manusia, dengan menyediakan konsep sistem pengelolaan dan pengolahan limbah dari bangunan dan (3) Memperhatikan orientasi (hadapan) bangunan, penempatan dinding yang dapat menyerap panas berlebih secara proporsional, organisasi ruang sedemikian hingga agar penggunaan AC dapat dioptimalkan tanpa mengurangi kenyamanan termal yang disyaratkan.

Akhirnya “**Perencanaan dan Perancangan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo**” merupakan jawaban publik terutama yang tepat dalam Mewadahi kegiatan perkantoran dari para anggota DPRD beserta dengan para pegawainya sehingga dapat berfungsi juga sebagai sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo untuk lebih memahami ciri khas Arsitektur Nagekeo

1.2 Identifikasi Masalah

Sejalan dengan judul dan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. Kondisi arsitektur lokal Kabupaten Nagekeo yang makin tergeser akibat arus globalisasi dan modernisasi pada seluruh aspek kehidupan terutama dalam bidang arsitektural dan dapat mengangkat potensi arsitektur lokal khas Kabupaten Nagekeo yang mampu mentransformasikan unsur filosofis atau adat istiadat serta bentuk dan tampilan dari berbagai unsur yang ada ke dalam sebuah perencanaan Kantor DPRD.
2. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan Kantor DPRD.
3. Keadaan topografi yang rawan terhadap gempa maka harus mempertimbangkan aspek iklim tropis yang ada pada lokasi perencanaan dengan perencanaan struktur yang sesuai.

4. Tidak tersedianya gedung yang layak untuk mendukung kinerja para anggota DPRD.

1.3 Rumusan Masalah

Sejalan dengan judul dan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. Bagaimana mengembalikan kearifan lokal yang dapat mencerminkan arsitektur lokal yang ada di Kabupaten Nagekeo pada Kantor DPRD?
2. Bagaimana mewujudkan sebuah Kantor DPRD yang dapat mengekspresikan fungsi dan bentuk secara merakyat?
3. Bagaimana penggunaan struktur yang tepat dengan memperhatikan keadaan topografi disertai iklim yang ada pada lokasi perencanaan Kantor DPRD?
4. Bagaimana penerapan tema “Transformasi Arsitektur” khususnya arsitektur lokal yang ada ke dalam bentuk dan tampilan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo serta olahan ruang yang baik agar dapat mendukung kinerja para anggota DPRD?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan fasilitas berupa gedung (Kantor DPRD) sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan pemetintahan yang mampu menciptakan motivasi serta menunjang kinerja para anggota DPRD dengan menerapkan unsur lokal Kabupaten Nagekeo yang akan menjadi tema perencanaan.

1.4.2 Sasaran

Adapun sasaran dari penulisan makalah ini yaitu:

1. Mampu mengekspresikan fungsi Kantor DPRD yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pemakainya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Menjadikan arsitektur lokal dari Kabupaten Nagekeo sebagai tema dalam perancangan Kantor DPRD.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Studi

1.5.1 Ruang Lingkup Studi

Berdasarkan latar belakang, lingkup penulisan ini mencakup:

1. Lingkup Substansi : Studi hanya dilakukan pada lokasi perencanaan yang baru di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa, Kelurahan Lape.
2. Lingkup Spasial : Prinsip dan konsep transformasi arsitektur difokuskan pada bentuk dan tampilan gedung, sistem struktur serta pembagian pola tata ruang.

1.5.2 Batasan Studi

Batasan dari perencanaan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo meliputi:

1. Latar belakang dari lokasi atau tempat perencanaan Kantor DPRD yang berada pada kawasan perkantoran (*civic center*) Kabupaten Nagekeo.
2. Analisis kawasan perkantoran Kabupaten Nagekeo yang berada pada jalan Bupati, Kecamatan Aesesa, Kelurahan Lape.
3. Analisis site terpilih yang berada di jalan Bupati, Kecamatan Aesesa, Kelurahan Lape.
4. Pembahasan diprioritaskan pada perencanaan fisik bangunan Kantor DPRD Kabupaten Negekeo dengan aspek peninjauan terutama pada nilai fungsional dan nilai arsitektural.

1.6 Metode Dan Teknik

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan survey/peninjauan langsung ke lokasi. Data tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi perencanaan dan perancangan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo. Data primer didapatkan dengan cara:

a. Studi Lapangan

Secara langsung turun ke lapangan atau survey lapangan untuk melakukan pengamatan/pengukuran guna mendapatkan data ukuran site, kondisi topografi, geologi, jenis tanah, jenis vegetasi yang tumbuh, orientasi tapak, untuk menunjang studi kelayakan lokasi.

b. Wawancara

Melakukan kontak person langsung dengan beberapa pihak atau responden, yaitu instansi pemerintah untuk mendapatkan masukan serta data – data DRPD Kabupaten Nagekeo.

2. Data Sekunder

Yaitu dengan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi atau acuan yang berkaitan dengan objek perencanaan, berupa peraturan-peraturan pemerintah terkait lokasi perencanaan serta data tentang DPRD Kabupaten Nagekeo.

1.6.2 Teknik Analisis Data

1. Kualitatif

Analisa ini dilakukan dengan mendeskripsikan tentang masalah yang ada di lapangan sehingga menemukan solusi atau jalan keluarnya. Analisa ini diprioritaskan pada:

- Kualitas penciptaan hubungan ruang serta pembagian zoning yang telah direncanakan
- Hubungan Transformasi arsitektur dengan ekspresi bangunan dan fungsi ruang

2. Kuantitatif

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu berdasarkan studi yang dibuat guna menentukan besaran atau luasan ruang dalam dalam kebutuhan ruang yang direncanakan. Analisa diorientasikan pada:

- Jumlah pemakai
- Dimensi ruangan, baik ruangan luar maupun ruangan dalam
- Fasilitas, perabot yang dipakai dalam obyek perencanaan sesuai dengan aktifitas dan fungsi dari bangunan
- Pengkondisian udara dan cahaya
- Struktur dan Konstruksi
- Utilitas bangunan

1.6.3 Kebutuhan Data

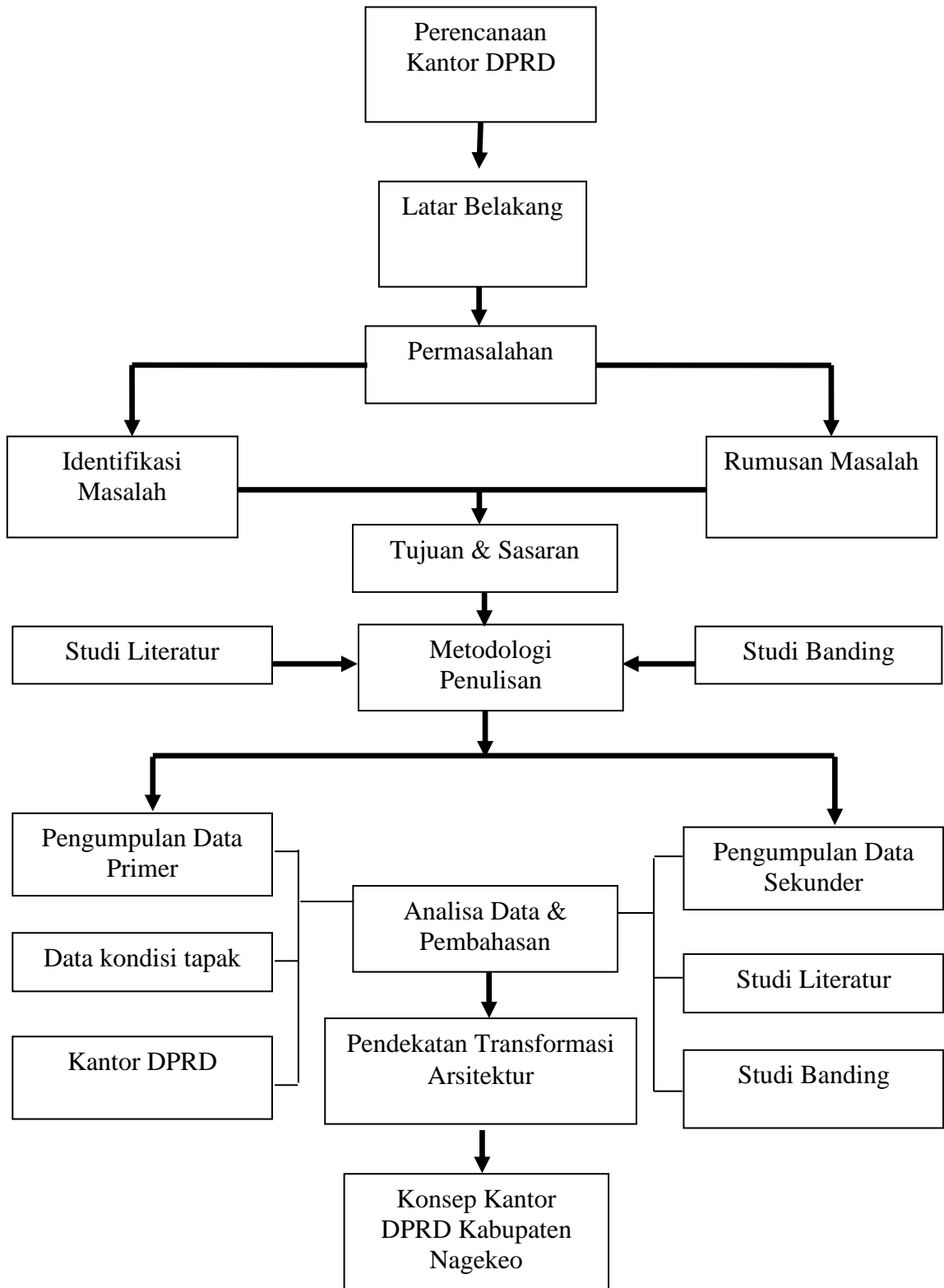
Data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Kebutuhan Data

No.	Jenis Data	Sumber Data	Metode	Alat/Instrumen Pengambilan Data	Kebutuhan
1.	Pengertian dan fungsi kantor DPRD	Literatur	Studi Literatur	Buku dan Website	Untuk kebutuhan tinjauan perencanaan kantor DPRD
2.	Pendekatan Transformasi Arsitektur	Literatur	Studi Literatur	Buku dan Website	Menata dan Mendesain konsep bangunan yang mengacu pada tema Transformasi Arsitektur
3.	Data jumlah jumlah anggota DPRD serta para staf	Kantor DPRD Kab. Nagekeo	Memberikan surat permohonan pengambilan data	Data dan Wawancara	Kebutuhan untuk menganalisa kebutuhan fasilitas, besaran dan organisasi ruang
4.	Data administrasi dan geografis Kabupaten Nagekeo	Kantor BAPPEDA Kab. Nagekeo, Kantor BPS Kabupaten Nagekeo	Memberikan surat permohonan pengambilan data	Data	Kebutuhan untuk menganalisa keadaan umum Kabupaten Nagekeo
5.	Data RTRW Kabupaten Nagekeo	Kantor BAPPEDA Kab. Nagekeo	Memberikan surat permohonan pengambilan data	Data	Kebutuhan tata ruang wilayah Kabupaten Nagekeo
6.	Keadaan eksisting dan peta lokasi studi	Hasil observasi lapangan	Memberikan surat permohonan pengambilan data	Kamera, meter, dan website	Kebutuhan fasilitas dan organisasi ruang, utilitas bangunan penunjang, site plan (tapak), ukuran, topografi, vegetasi, dan batas

(Sumber : Analisa Penulis)

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang studi, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup permasalahan serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini merupakan penjabaran dari kajian literatur mengenai dasar – dasar teori dan referensi – referensi yang berkaitan dengan gedung atau kantor DPRD serta pendekatan transformasi arsitektur.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Berisikan tentang Tinjauan umum wilayah perencanaan, administrative dan geografis, fisik dasar iklim (iklim, cuaca, topografi, geologi, vegetasi), ekonomi, sosial budaya, tinjauan rencana tata ruang, tinjauan khusus lokasi perencanaan, lokasi, batas fisik, potensi dan peluang.

BAB IV ANALISA

Berisikan tentang analisis kondisi eksisting dan analisis penerapan konsep Transformasi Arsitektur terhadap Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo.

BAB V KONSEP

Berisikan tentang hasil dari analisis yang mencakup hasil analisis kondisi eksisting dan analisis penerapan konsep Transformasi Arsitektur terhadap Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo.

DAFTAR PUSTAKA